

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perubahan dalam pemerintahan Indonesia seiring dengan terjadinya reformasi mengakibatkan perubahan dari sistem pemerintahan yang awalnya tersentralisasi menjadi sistem sistem desentralisasi yang bertujuan pada pembentukan otonomi daerah. Pemerintah daerah didefinisikan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6), yaitu Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah perlu dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab.

Pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat adalah langkah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah, dengan tujuan agar pemerintah dapat menjalankan tata kelola pemerintahan dengan lebih efektif.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Apip dan Maesaroh, 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi, mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan APBD. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sesuai dengan pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah.

Selain itu, akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik diperlukan dalam proses anggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus terdapat laporannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi Masyarakat daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini kemudian akan menjamin pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Setiap pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam penyelenggaraan keuangan daerah serta dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan keuangan daerah. Laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas Perusahaan atau instansi. Jika informasi ini disajikan dengan benar, informasi tersebut sangat berguna bagi siapa saja untuk pengambilan keputusan (Harahap, 2015:1).

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Cottalismewati et al., 2022).

Kinerja adalah suatu ukuran prestasi atau hasil dalam mengelola dan menjalankan suatu organisasi dimana berhubungan dengan segala hal yang akan, sedang dan telah dilakukan organisasi dalam kurun waktu tertentu (Annisa, 2017). Kinerja tidak hanya mencakup hasil akhir, tetapi juga proses pengelolaan dan pelaksanaan. Ini mencakup efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan yang tepat.

Kinerja telah menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan berbagai organisasi mulai dari Perusahaan hingga pemerintah bahkan pula perguruan tinggi. Demikian juga kinerja masuk dalam setiap aspek ekonomi kemsyarakatan. Kondisi ini terlihat dari banyaknya organisasi yang memasukkan kinerja dalam visi dan misi

nya. Pencapaian kinerja tidak hanya diharapkan pada karyawan saja, melainkan dalam jangka Panjang diharapkan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan (Ratna dan Nasrah, 2016).

Kinerja menjadi gambaran mengenai Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output yang berkualitas, membandingkan hasil kerja dengan rencana kerja, serta menunjuk efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau deficit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dikarenakan sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Nordiawan, Deddi, dan Hertianti, 2011).

Pengukuran kinerja adalah suatu sasaran dan proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi serta menentukan efisiensi dan efektivitas tugas-tugas pemerintah daerah serta pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja merupakan ukuran tentang apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi dan seberapa baik kinerjanya (Mardiasmo, 2007:44). Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengevaluasi kinerja pimpinan dan lembaga serta mengevaluasi peran organisasi dan pimpinan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Isu tentang kinerja pemerintah menjadi sorotan publik karena belum maksimal menampilkan hasil yang baik. Fenomena terkait kinerja pemerintah di Indonesia, menurut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan dan RB Erwan Agus Purwanto, mengatakan bahwa pada Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) terdapat 37 dari 77 indikator kinerja pemerintah pusat pada tahun anggaran 2022 tidak mencapai target. Terdapat 5 indikator sesuai target, dan 18 indikator melampaui target, sedangkan 17 indikator lainnya belum teridentifikasi dalam laporan. Menurut Azwar Anas, ketidaktercapaian indikator kinerja pemerintah disebabkan oleh Kementerian dan Lembaga yang belum seluruhnya berorientasi pada hasil. Hal ini ditambah sistem pengukuran kinerja dan pengumpulan data juga belum mampu menyediakan informasi yang valid, relevan, dan tepat waktu. (Kompas, 2023)

Adapun fenomena terkait kinerja pemerintah daerah selanjutnya yaitu, menurut Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 2022, tentang Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Garut tahun 2022 masih terdapat beberapa indikator sasaran kinerja belum mencapai target yang diharapkan. Permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2022 antara lain masih rendahnya kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk dapat mewujudkan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan. (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, 2022)

Salah satu indikator sasaran kinerja yang belum mencapai target yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan

indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Adapun hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2021
(Kabupaten Se-Jawa Barat Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah
Tinggi)

NO.	KABUPATEN	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	Kabupaten Karawang	85,212	Baik	A
2.	Kabupaten Sumedang	82,330	Baik	A
3.	Kabupaten Tasikmalaya	78,018	Baik	A
4.	Kabupaten Purwakarta	77,523	Perlu Perbaikan	B
5.	Kabupaten Garut	75,701	Perlu Perbaikan	B
6.	Kabupaten Bandung	75,061	Perlu Perbaikan	B
7.	Kabupaten Sukabumi	71,040	Perlu Perbaikan	B
8.	Kabupaten Bogor	68,784	Perlu Perbaikan	B
9.	Kabupaten Majalengka	68,280	Perlu Perbaikan	B
10.	Kabupaten Cirebon	64,288	Perlu Perbaikan	B
11.	Kabupaten Ciamis	62,304	Perlu Perbaikan	B
12.	Kabupaten Subang	61,710	Perlu Perbaikan	B

NO.	KABUPATEN	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
13.	Kabupaten Pangandaran	58,049	Perlu Perbaikan	B
14	Kabupaten Bandung Barat	57,673	Perlu Perbaikan	B
15.	Kabupaten Bekasi	56,448	Perlu Perbaikan	B
16.	Kabupaten Indramayu	55,449	Perlu Perbaikan	B
17.	Kabupaten Cianjur	49,446	Sangat Perlu Perbaikan	C
RATA RATA NASIONAL		65,4534		
STANDAR DEVIASI NASIONAL		12,4385		

Sumber : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.714-Bp2d/2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 14 kabupaten dari 17 kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang masih memiliki kategori perlu perbaikan dengan jumlah 13 kabupaten dan kategori sangat perlu perbaikan dengan jumlah 1 kabupaten.

Adapun dari 17 Kabupaten/ Kota, Kabupaten Garut terdapat pada nomor 5 dengan indeks total sebesar 75,701 dengan kategori perlu perbaikan dengan nilai B. Adapun kelemahan pada Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut yaitu, pertama kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan nilai 8,21 dari bobot 15 dan kondisi keuangan daerah dengan nilai 3,120 dari bobot 15. Maka dari itu, diperlukannya perbaikan atau pun evaluasi kembali agar indeks

total Kabupaten Garut mengalami peningkatan dan memasuki kategori baik dengan nilai A.

Adanya permasalahan terhadap salah satu sasaran indikator kinerja ini menunjukkan bahwa kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kabupaten Garut ini dinilai belum mencapai/ melampaui target. Dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi, berbagai faktor memegang peranan penting. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengelolaan keuangan yang baik dan sistem akuntansi yang baik. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan dua faktor yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan, sedangkan sistem keuangan yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Terdapat banyak faktor yang berkontribusi pada kesuksesan sebuah organisasi dalam meningkatkan kinerjanya, baik yang telah terkonfirmasi melalui penelitian sebelumnya maupun faktor-faktor yang belum dieksplorasi dalam penelitian. Veronica et al., (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan. Pengelolaan keuangan yang baik menjamin pelaporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat menunjukkan kinerja yang baik pula pada perusahaan atau organisasi.

Selanjutnya, faktor kedua yang dapat mempengaruhi dalam meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, karena suatu organisasi atau Perusahaan dapat dikatakan sukses dalam meningkatkan kinerjanya apabila sistem akuntansi keuangan daerah berjalan dengan baik dan efektif. Menurut Veronica et al., (2019) dalam penelitiannya menerangkan bahwa pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan Keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas-entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi).

Menurut Rahmad Hidayat (2015) dalam penelitiannya menerangkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang memadai tidak hanya dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaran dana, tetapi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tersebut juga dapat mendukung pada pencapaian kinerja, penilaian pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja pemerintahan itu sendiri, pengukuran dalam

pencapaian kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Hidayat 2015). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah juga sebagai alat kontrol keuangan yang dapat memberikan bantuan yang memadai untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya dan merupakan pendukung terciptanya Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik.

Penulis dalam hal ini memandang bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menjadi dua hal yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait hubungannya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Selain teori tersebut, penelitian ini juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Rahmad Hidayat (2015) dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya ialah berbeda pada lokasi penelitian, peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada SKPD di Kabupaten Padang Pariaman sedangkan penelitian ini pada SKPD di Kabupaten Garut.

Penelitian mengenai Kinerja Pemerintah Daerah juga dilakukan oleh Vivid Annisa (2017) berjudul “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” . Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Good Governance berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa ketiganya bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sitti Murniati (2020) mengenai “Pengaruh Pengawasan, Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Pengawasan, Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Selain itu terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Diana Nova Lintang, David Paul Elia Saerang & Ventje Ilat (2017) dengan judul “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Akuntansi berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan, Pengawasan Internal tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari salah satu penelitian diatas yaitu yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat (2015) dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman)”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah pada pimpinan SKPD Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu Kepala Badan/Dinas, Sekretaris Badan/Dinas dan Sub bagian akuntansi dan keuangan pada beberapa SKPD Kabupaten Garut. Adapun perbedaan lain pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Penggunaan dimensi pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah peneliti menggunakan dimensi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi asset, prosedur akuntansi selain kas (Halim and Kusufi 2012). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran, dan pelaporan (Kepmendagri No.29 Tahun 2002).
2. Penggunaan dimensi pada variabel Kinerja Pemerintah Daerah peneliti menggunakan dimensi masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) (Mahsun, 2017:196). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) (Mohamad, 2006:77).

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai hubungan antara variabel tersebut pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Garut dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi berjudul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja**

Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Garut.
2. Bagaimana Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Garut.
3. Bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Garut.
4. Seberapa besar pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Garut.
5. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Garut.
6. Seberapa besar pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Garut.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Garut.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Garut.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Garut.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Garut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Akan lebih dijelaskan kedua kegunaan tersebut sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terutama ilmu Akuntansi, khususnya mengenai Akuntansi Pemerintahan dan Sektor Publik terutama dalam hal

pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi beberapa pihak yang terkait dan membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pasundan Bandung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- c. Hasil penelitian ini juga digunakan sebagai sarana bagi penulis dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, khususnya mengenai topik yang penulis buat.

2. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran serta pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi khususnya mengenai pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Garut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi terutama bagi pihak yang melakukan penelitian yang sama terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik.

4. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumber informasi dan pengetahuan serta gambaran awam mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di Kabupaten Garut. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek penelitian yang akan diteliti dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2024.